



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2019/Periodik - 2018)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
**SUB UNIT KERJA** : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **UMI SALMAH**
2. Jabatan : **PANITERA MUDA PERKARA PERMOHONAN**
3. NHK : **415940**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 576 m2/168 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 46.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 119.459.834**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 815.959.834**III. HUTANG** Rp. 98.282.198**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 717.677.636

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.